



PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 13 TAHUN 2024

BUKU I

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU



GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah Kepada Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

- tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 6);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN
ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Provinsi Riau yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 berjumlah semula sebesar Rp11.020.380.657.451 bertambah sebesar Rp 170.204.541.888 sehingga menjadi Rp11.190.585.199.339 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp.	10.061.898.797.594
b. Bertambah	Rp.	1.059.575.036.678
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.	11.121.473.834.272
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.	11.020.380.657.451
b. Bertambah	Rp.	170.204.541.888
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.	11.190.585.199.339
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	
a. Semula	Rp.	958.481.859.857
b. Berkurang	Rp.	(889.370.494.790)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	69.111.365.067
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	
a. Semula	Rp.	0
b. Bertambah	Rp.	0
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0
Pembiayaan Netto	Rp.	69.111.365.067

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0
---	-----	---

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
a. Semula	Rp.	5.984.937.544.594
b. Bertambah	Rp.	797.988.582.212
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	6.782.926.126.806
b. Pendapatan Transfer		
a. Semula	Rp.	4.069.181.213.000
b. Bertambah	Rp.	260.427.442.466
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	4.329.608.655.466
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		
a. Semula	Rp.	7.780.040.000
b. Bertambah	Rp.	1.159.012.000
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	8.939.052.000

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah		
a. Semula	Rp.	4.382.173.075.085
b. Bertambah	Rp.	151.937.483.425
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	4.534.110.558.510
b. Retribusi Daerah		
a. Semula	Rp.	25.970.361.800
b. Berkurang	Rp.	(9.045.635.000)
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	16.924.726.800
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
a. Semula	Rp.	1.097.539.778.218
b. Bertambah	Rp.	595.461.777.993

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	1.693.001.556.211
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
a. Semula	Rp.	479.254.329.491
b. Bertambah	Rp.	59.634.955.794
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	538.889.285.285
(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan		
a. Semula	Rp.	4.069.181.213.000
b. Bertambah	Rp.	260.427.442.466
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	4.329.608.655.466
b. Pendapatan transfer antar daerah.		
a. Semula	Rp.	0
b. Bertambah	Rp.	0
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	0
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:		
a. Pendapatan hibah;		
a. Semula	Rp.	7.780.040.000
b. Bertambah	Rp.	1.159.012.000
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	8.939.052.000
b. Dana darurat;		
a. Semula	Rp.	0
b. Bertambah	Rp.	0
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.	0
c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;		
a. Semula	Rp.	0
b. Bertambah	Rp.	0
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi;		
a. Semula	Rp.	6.513.647.372.068,00
b. Bertambah	Rp.	318.129.736.094,65
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp.	6.831.777.108.162,65
b. Belanja modal;		
a. Semula	Rp.	2.211.686.315.968
b. Bertambah	Rp.	238.247.307.574
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	2.449.933.623.542
c. Belanja tidak terduga; dan		
a. Semula	Rp.	40.075.754.136
b. Berkurang	Rp.	(25.075.754.136)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	15.000.000.000
d. Belanja transfer.		
a. Semula	Rp.	2.254.971.215.279,00
b. Berkurang	Rp.	(361.096.747.644,65)
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	1.893.874.467.634,35

Pasal 6

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai;		
a. Semula	Rp.	2.945.575.346.348,00
b. Bertambah	Rp.	200.761.809.757,16
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	3.146.292.159.105,16
b. Belanja barang dan jasa;		
a. Semula	Rp.	2.956.052.133.050,00
b. Bertambah	Rp.	131.634.055.738,49
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	3.087.686.188.788,49
c. Belanja hibah;		
a. Semula	Rp.	567.889.708.670
b. Bertambah	Rp.	7.286.872.599
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	575.176.581.269
d. Belanja bantuan sosial;		

a. Semula	Rp.	44.130.184.000
b. Berkurang	Rp.	(21.508.002.000)
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	22.622.182.000
(2) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:		
a. Belanja modal tanah;		
a. Semula	Rp.	20.700.000.000
b. Berkurang	Rp.	(16.273.794.129)
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	4.426.205.871
b. Belanja modal peralatan dan mesin;		
a. Semula	Rp.	310.377.810.166
b. Bertambah	Rp.	45.896.627.254
Jumlah belanja peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.	356.274.437.420
c. Belanja modal Gedung dan bangunan;		
a. Semula	Rp.	383.327.474.779
b. Berkurang	Rp.	(3.720.980.201)
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.	379.606.494.578
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;		
a. Semula	Rp.	1.460.398.466.983
b. Bertambah	Rp.	213.063.842.050
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp.	1.673.462.309.033
e. Belanja modal aset tetap lainnya;		
a. Semula	Rp.	36.614.830.000
b. Berkurang	Rp.	(723.387.400)
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp.	35.891.442.600
f. Belanja modal aset lainnya;		
a. Semula	Rp.	267.734.040
b. Bertambah	Rp.	5.000.000
Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp.	272.734.040
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:		
a. Semula	Rp.	40.075.754.136
b. Berkurang	Rp.	(25.075.754.136)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	15.000.000.000
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
a. Belanja bagi hasil		
a. Semula	Rp.	1.794.967.836.279,00
b. Berkurang	Rp.	(335.054.747.644,65)
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	1.459.463.088.634,35
b. Belanja bantuan keuangan		
a. Semula	Rp.	460.003.379.000
b. Berkurang	Rp.	(25.592.000.000)
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	434.411.379.000

Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan		
a. Semula	Rp.	958.481.859.857
b. Berkurang	Rp.	(889.370.494.790)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	69.111.365.067
b. Pengeluaran pembiayaan		
c. Semula	Rp.	0
d. Bertambah	Rp.	0
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
a. Semula	Rp.	958.481.859.857
b. Berkurang	Rp.	(889.370.494.790)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	69.111.365.067
b. Pencairan dana cadangan		
a. Semula	Rp.	0
b. Bertambah	Rp.	0

Jumlah dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
a. Semula	Rp.	0
b. Bertambah	Rp.	0
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0
d. Penerimaan pinjaman daerah		
a. Semula	Rp.	0
b. Bertambah	Rp.	0
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		
a. Semula	Rp.	0
b. Bertambah	Rp.	0
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan		
c. Semula	Rp.	0
d. Bertambah	Rp.	0
Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:		
a. Pembentukan dana cadangan		
a. Semula	Rp.	0
b. Bertambah	Rp.	0
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0
b. Penyertaan modal daerah		
a. Semula	Rp.	0
b. Bertambah	Rp.	0
Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.	0

c. pembayaran cicilan pokok Utang Yang Jatuh Tempo		
a. Semula	Rp.	0
b. Bertambah	Rp.	0
Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.	0
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
a. Semula	Rp.	0
b. Bertambah	Rp.	0
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.	0
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
a. Semula	Rp.	0
b. Bertambah	Rp.	0
Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Provinsi Riau dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Riau selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Provinsi dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Provinsi dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah ;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain ;
14. Lampiran XIV Daftar Sub. Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan ;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Oktober 2024
Pj. GUBERNUR RIAU,

RAHMAN HADI

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Oktober 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,


MUHAMMAD TAUFIQ/ABESMAN HAMID

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR : 13

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU: 14-263/2024



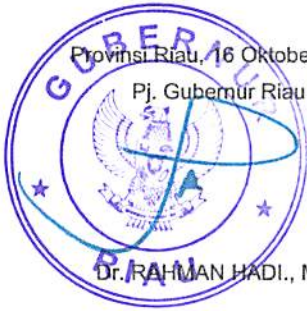
PROVINSI RIAU

RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.984.937.544.594,00	6.782.926.126.806,00	797.988.582.212,00
4.1.01	Pajak Daerah	4.382.173.075.085,00	4.534.110.558.510,00	151.937.483.425,00
4.1.02	Retribusi Daerah	25.970.361.800,00	16.924.726.800,00	-9.045.635.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.097.539.778.218,00	1.693.001.556.211,00	595.461.777.993,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	479.254.329.491,00	538.889.285.285,00	59.634.955.794,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	4.069.181.213.000,00	4.329.608.655.466,00	260.427.442.466,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.069.181.213.000,00	4.329.608.655.466,00	260.427.442.466,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.780.040.000,00	8.939.052.000,00	1.159.012.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.780.040.000,00	8.939.052.000,00	1.159.012.000,00
	Jumlah Pendapatan	10.061.898.797.594,00	11.121.473.834.272,00	1.059.575.036.678,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	6.513.647.372.068,00	6.831.777.108.162,65	318.129.736.094,65
5.1.01	Belanja Pegawai	2.945.575.346.348,00	3.146.292.156.105,16	200.716.809.757,16
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.956.052.133.050,00	3.087.686.188.788,49	131.634.055.738,49
5.1.05	Belanja Hibah	567.889.708.670,00	575.176.581.269,00	7.286.872.599,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	44.130.184.000,00	22.622.182.000,00	-21.508.002.000,00
5.2	BELANJA MODAL	2.211.686.315.968,00	2.449.933.623.542,00	238.247.307.574,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	20.700.000.000,00	4.426.205.871,00	-16.273.794.129,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	310.377.810.166,00	356.274.437.420,00	45.896.627.254,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	383.327.474.779,00	379.606.494.578,00	-3.720.980.201,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.460.398.466.983,00	1.673.462.309.033,00	213.063.842.050,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	36.614.830.000,00	35.891.442.600,00	-723.387.400,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	267.734.040,00	272.734.040,00	5.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	40.075.754.136,00	15.000.000.000,00	-25.075.754.136,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	40.075.754.136,00	15.000.000.000,00	-25.075.754.136,00
5.4	BELANJA TRANSFER	2.254.971.215.279,00	1.893.874.467.634,35	-361.096.747.644,65
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.794.967.836.279,00	1.459.463.088.634,35	-335.504.747.644,65
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	460.003.379.000,00	434.411.379.000,00	-25.592.000.000,00
	Jumlah Belanja	11.020.380.657.451,00	11.190.585.199.339,00	170.204.541.888,00
	Total Surplus/(Defisit)	-958.481.859.857,00	-69.111.365.067,00	889.370.494.790,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	958.481.859.857,00	69.111.365.067,00	-889.370.494.790,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	958.481.859.857,00	69.111.365.067,00	-889.370.494.790,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
	Pembiayaan Netto	958.481.859.857,00	69.111.365.067,00	-889.370.494.790,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Provinsi Riau, 16 Oktober 2024
Pj. Gubernur Riau

Dr. RAHMAN HADI., M.Si



PROVINSI RIAU

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2024

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja									Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer					
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	380.739.289.491,00	418.215.167.743,00	4.266.982.340.794,00	4.427.905.033.788,62	2.073.821.810.370,00	2.298.849.515.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340.804.151.164,00	6.726.754.549.314,62	385.950.398.150,62	
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	3.944.720.000,00	4.244.720.000,00	2.436.174.339.822,00	2.465.219.774.116,00	429.373.661.821,00	449.183.052.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865.548.001.643,00	2.914.402.826.922,00	48.854.825.279,00	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	3.944.720.000,00	4.244.720.000,00	2.431.289.665.814,00	2.460.627.371.529,00	422.067.511.015,00	441.876.902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853.357.176.829,00	2.902.504.273.529,00	49.147.096.700,00	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0001	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I	0,00	0,00	1.294.424.150,00	1.206.124.150,00	1.832.217.856,00	1.832.217.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126.642.006,00	3.038.342.006,00	-88.300.000,00	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0002	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II	0,00	0,00	1.131.738.583,00	1.029.392.644,00	1.842.062.150,00	1.842.062.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973.800.733,00	2.871.454.794,00	-102.345.939,00	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0003	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III	0,00	0,00	1.283.685.401,00	1.253.953.989,00	1.796.463.300,00	1.796.463.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080.148.701,00	3.050.417.289,00	-29.731.412,00	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0004	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV	0,00	0,00	1.174.825.874,00	1.102.931.804,00	1.835.407.500,00	1.835.407.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010.233.374,00	2.938.339.304,00	-71.894.070,00	
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	370.438.409.491,00	410.075.687.743,00	1.059.527.468.974,00	1.144.620.655.995,61	123.154.671.889,00	127.378.710.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.682.140.863,00	1.271.999.366.026,61	89.317.225.163,61	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	2.906.000.000,00	906.000.000,00	357.067.182.419,00	577.495.783.997,61	1.099.861.004,00	1.084.861.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.167.043.423,00	578.580.645.001,61	220.413.601.578,61	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD	308.862.721.748,00	350.500.000.000,00	523.677.760.113,00	454.204.052.580,00	82.627.267.770,00	91.600.819.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.305.027.883,00	545.804.871.988,00	-60.500.155.895,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	UPT. RUMAH SAKIT JiWA TAMPAN	32.469.887.914,00	32.469.887.914,00	92.754.881.109,00	55.199.408.060,00	25.214.446.311,00	21.688.483.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.969.327.420,00	76.887.891.371,00	-41.081.436.049,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI	26.199.799.829,00	26.199.799.829,00	75.584.303.565,00	47.278.088.195,00	13.172.643.735,00	11.964.093.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.756.947.300,00	59.242.181.434,00	-29.514.765.866,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	UPT. BALAI PELATIHAN KESEHATAN	0,00	0,00	439.318.138,00	439.318.138,00	1.040.453.069,00	1.040.453.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.771.207,00	1.479.771.207,00	0,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN	0,00	0,00	2.490.126.367,00	2.490.107.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490.126.367,00	2.490.107.762,00	-18.605,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	UPT. INSTALASI FARMASI DAN LOGISTIK KESEHATAN	0,00	0,00	7.513.897.263,00	7.513.897.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.513.897.263,00	7.513.897.263,00	0,00	
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.333.360.000,00	3.883.360.000,00	616.001.116.097,00	673.436.702.793,85	1.509.532.520.282,00	1.709.985.816.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125.533.636.379,00	2.383.422.519.791,85	257.888.883.412,85	

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	325.508.227,00	325.508.227,00	325.508.227,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1.755.569.380,00	1.755.569.380,00	1.668.069.380,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.514.046.306,00	15.514.046.306,00	15.601.546.306,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.101.497.212,00	12.101.497.212,00	12.101.497.212,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.101.497.212,00	12.101.497.212,00	12.101.497.212,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.342.857.258,00	1.342.857.258,00	1.430.357.258,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.990.000,00	19.990.000,00	19.990.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	319.630.419,00	319.630.419,00	407.130.419,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	231.238.609,00	231.238.609,00	231.238.609,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.998.043,00	27.998.043,00	27.998.043,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.999.420,00	15.999.420,00	15.999.420,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	7.994.767,00	7.994.767,00	7.994.767,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	720.006.000,00	720.006.000,00	720.006.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	278.955.144,00	278.955.144,00	278.955.144,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	63.200.000,00	63.200.000,00	63.200.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	215.755.144,00	215.755.144,00	215.755.144,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.356.904.692,00	1.356.904.692,00	1.356.904.692,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	219.050.660,00	219.050.660,00	219.050.660,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.647.500,00	35.647.500,00	35.647.500,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.102.206.532,00	1.102.206.532,00	1.102.206.532,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	433.832.000,00	433.832.000,00	433.832.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	176.800.000,00	176.800.000,00	176.800.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	Rancangan APBD Perubahan
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.320.000,00	89.320.000,00	89.320.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	159.712.000,00	159.712.000,00	159.712.000,00
TOTAL							11.074.722.904.339,00	11.184.722.904.339,00	11.190.585.199.339,00

Provinsi Riau, 16 Oktober 2024
Pj. Gubernur Riau

Dr. RAHMAN HADI., M.Si



PROVINSI RIAU

SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI

TAHUN ANGGARAN 2024

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	0,00	4.573.823.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	0,00	58.600.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	590.319.940,00	0,00	4.980.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	36.057.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	139.999.935,00	101.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.999.935,00	0,00
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	324.999.697,00	74.999.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.999.697,00	0,00
7	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH I	396.755.800,00	339.484.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.755.800,00	0,00
8	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH III	692.396.000,00	638.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.396.000,00	0,00
9	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	30.524.847.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.705.915.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.915.254,00	0,00
11	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.182.718.968,00	2.206.725.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.718.968,00	0,00
12	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH	218.833.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.833.858,00	0,00
13	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPT. LABORATORIUM PENGUJIAN	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.622.993.000,00	1.818.293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622.993.000,00	0,00
15	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	12.637.212.713,00	10.055.812.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.637.212.713,00	0,00
16	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	347.235.000,00	322.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.235.000,00	0,00
17	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	0,00	23.994.172.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	131.088.750,00	72.365.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.088.750,00	0,00
19	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	UPT. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	145.512.008,00	144.012.008,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.812.008,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
20	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPT. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	429.434.990,00	430.934.990,00	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.734.990,00	0,00
21	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	9.216.112.922,00	7.287.746.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.216.112.922,00	0,00
22	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	9.193.141.386,00	2.408.916.699,00	82.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275.761.386,00	0,00
23	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	68.233.710,00	232.931.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.233.710,00	0,00
24	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	265.140.789,00	265.140.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.140.789,00	0,00
25	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	221.741.053,00	183.319.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.741.053,00	0,00
26	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	918.957.914,00	1.242.372.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.957.914,00	0,00
27	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	778.879.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.879.675,00	0,00
28	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	PROGRAM PENATAAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	103.393.385,00	103.393.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.393.385,00	0,00
29	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	129.517.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.517.952,00	0,00
30	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0,00	21.294.033.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	61.324.746,00	47.792.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.324.746,00	0,00
32	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	0,00	3.962.373.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG	0,00	12.044.042.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	1.157.041.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	7.939.457.477,00	0,00	385.125.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	889.562.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.371.311.406,00	2.468.123.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371.311.406,00	0,00
38	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.345.859.488,00	1.217.884.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.859.488,00	0,00
39	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	7.977.245.210,00	6.008.741.179,00	1.066.025.110,00	1.294.150.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.043.270.320,00	0,00
40	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.586.721.965,00	1.791.476.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586.721.965,00	0,00
41	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	0,00	127.946.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	0,00	3.528.798.682,00	0,00	192.569.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II	598.893.086,00	509.304.165,00	1.842.062.150,00	1.842.062.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440.955.236,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
44	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II	532.845.497,00	520.088.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.845.497,00	0,00
45	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III	736.730.156,00	675.750.156,00	1.796.463.300,00	1.796.463.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533.193.456,00	0,00
46	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III	296.638.245,00	339.248.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.638.245,00	0,00
47	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV	652.062.294,00	595.927.258,00	1.835.407.500,00	1.835.407.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487.469.794,00	0,00
48	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV	522.763.580,00	507.004.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.763.580,00	0,00
49	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.766.939.934,00	4.813.213.070,00	2.997.289.992,00	3.487.654.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.764.229.926,00	0,00
50	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	DINAS PARIWISATA	0,00	3.513.463.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	837.104.364,00	3.248.129.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.104.364,00	0,00
52	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.035.277.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.277.156,00	0,00
53	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	61.411.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.411.052,00	0,00
54	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	89.986.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.986.648,00	0,00
55	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.221.597.081,00	2.903.636.812,00	1.097.764.096,00	278.342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319.361.177,00	0,00
56	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	643.199.907,00	653.057.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.199.907,00	0,00
57	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	588.219.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	1.908.797.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	20.026.080.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	1.076.717.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	179.835.266.733,00	785.609.442.656,00	36.754.958.529,00	422.484.418.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.590.225.262,00	0,00
63	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN	20.529.933.524,00	1.622.515.995.098,00	7.541.578.904,00	7.835.310.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.071.512.428,00	0,00
64	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL	0,00	1.494.225.252,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	2.420.018.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
66	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH	113.721.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.721.840,00	0,00
67	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPT. BUDIDAYA PERIKANAN	1.324.247.828,00	1.304.892.778,00	343.608.452,00	382.161.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667.856.280,00	0,00
68	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK	279.903.360,00	279.903.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.903.360,00	0,00
69	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPT. PELABUHAN PERIKANAN	542.633.011,00	630.673.011,00	93.609.793,00	93.609.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.242.804,00	0,00
70	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH I	315.757.355,00	309.725.355,00	62.585.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.342.814,00	0,00
71	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH III	333.340.332,00	333.340.332,00	18.104.320,00	18.104.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.444.652,00	0,00
72	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	UPT. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	0,00	340.488.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	UPT. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	0,00	209.199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD	0,00	15.857.025.750,00	0,00	76.319.840.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD	0,00	344.933.387.400,00	0,00	5.566.612.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	UPT. SCIENCE TECHNO PARK	669.504.707,00	669.504.707,00	76.128.000,00	76.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.632.707,00	0,00
77	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPT. SCIENCE TECHNO PARK	1.925.295.406,00	1.906.688.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.295.406,00	0,00
78	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	DINAS KEBUDAYAAN	3.478.512.643,00	3.478.512.643,00	325.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803.512.643,00	0,00
79	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DINAS KEBUDAYAAN	2.194.074.187,00	1.749.425.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194.074.187,00	0,00
80	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	UPT. MUSEUM SANG NILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA	629.999.896,00	629.999.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.999.896,00	0,00
TOTAL				282.380.317.396,00	2.976.985.434.029,00	55.950.805.605,00	529.115.961.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.331.123.001,00	3.506.101.395.074,00

Provinsi Riau, 16 Oktober 2024
Pj. Gubernur Riau

Dr. RAHMAN HADI., M.Si

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

TAHUN ANGGARAN 2024

GOLONGAN/ RUANG	ESELON				NON ESELON				JUMLAH
	I	II	III	IV	TENAGA FUNGSIONAL			PELAKSANA	
					PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Golongan IV/ e	1				1	18	3		23
Golongan IV/ d		21			1	14	11	4	51
Golongan IV/ c		15	7		441	81	60	6	610
Golongan IV/ b		5	119	7	1253	68	90	89	1631
Golongan IV/ a		0	96	61	1170	102	230	266	1925
Jumlah Golongan IV	1	41	222	68	2866	283	394	365	4240
Golongan III/ d			45	192	1790	330	560	1037	3954
Golongan III/ c			5	98	637	147	300	602	1789
Golongan III/ b				25	573	174	216	723	1711
Golongan III/ a					232	52	79	485	848
Jumlah Golongan III			50	315	3232	703	1155	2847	8302
Golongan II/ d						72	25	558	655
Golongan II/ c						26	37	270	333
Golongan II/ b							2	63	65
Golongan II/ a							20	35	55
Jumlah Golongan II						98	84	926	1108
Golongan I/ d								16	16
Golongan I/ c								10	10
Golongan I/ b								2	2
Golongan I/ a									
Jumlah Golongan I								28	28
PPPK					8454	341	172		8967
Jumlah PPPK					8454	341	172		8967
Total Jumlah Pegawai	1	41	272	383	14552	1425	1805	4166	22645

Pekanbaru, 16 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR RIAU,

Dr. RAHMAN HADI.,M.Si

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DAFTAR PIUTANG DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah piutang sampai dengan Tahun 2023 (31 Desember 2023)	Jumlah piutang sampai dengan Tahun 2024 (30 Juni 2024)	Perkiraan Pengurangan tahun N-1	Perkiraan Saldo Akhir tahun N-1
1	2	3	4	5	6	7
1	Piutang Pendapatan		67.815.540.136,54	37.110.970.653,54		37.110.970.653,54
	Piutang Pajak Daerah	2023				
	Piutang Retribusi Daerah	2023	788.928.376,00	620.928.376,00		620.928.376,00
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2023				
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2023	67.026.611.760,54	36.490.042.277,54		36.490.042.277,54
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	2023				
	Piutang Transfer Antar Daerah	2023				
2	Piutang Lain-lain	2023	1.167.498.855,00	1.167.498.855,00		1.167.498.855,00
	Jumlah		68.983.038.991,54	38.278.469.508,54		38.278.469.508,54

Pekanbaru, 16 Oktober 2024
Pj. GUBERNUR RIAU,

Dr. RAHMAN HADI.,M.Si

PROVINSI RIAU

DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA

TAHUN ANGGARAN 2024

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ lembaga/Pihak Ketiga	Jumlah Penyertaan Modal Investasi Daerah	Penyertaan Modal Tahun 2023	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini (Per 30 Juni 2024)	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah Tahun ini (Per 31 Desember 2023)
1	2	3	6	7	9	10	11
	2000-2011	PT. Bank Riau Kepri	519.168.200.000,00	997.440.374.904,00	1.434.194.545.667,00	-	97.019.977.629,00
	1990,2012	PD. Sarana Pembangunan Riau (SPR)	49.010.951.646,00	(37.881.777.875,87)	14.178.290.567,57	-	2.050.000.000,00
	2001-2012	PT. Riau Airlines (RAL)	149.700.000.000,00	(149.700.000.000,00)	-	-	-
	2002-2012	PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR)	124.990.600.000,00	22.652.817.434,76	149.873.076.118,13	-	-
	2002,2012	PT. Riau Petroleum	7.250.000.000,00	772.025.222.686,87	279.993.632.875,87	-	800.000.000.000,00
	2003,2012	PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER)	80.014.185.000,00	12.964.905.867,38	92.979.090.867,38	-	2.102.966.178,00
	2004-2012	PT. Sarana Penjamin Kredit Riau/Jamkrida	50.463.000.000,00	12.254.768.479,33	68.182.117.017,23	-	4.025.270.391,65
	2003,2004,2010	PT. ASKRIDA	1.250.000.000,00		1.250.000.000,00	-	220.060.325,00
	2009	PT. Bumi Siak Pusako	45.000.000.000,00	-	45.000.000.000,00	-	43.232.411.008,00
		Jumlah Penyertaan Modal	1.026.846.936.646,00	1.629.756.311.496,47	2.085.650.753.113,18	-	948.650.685.531,65
	2010	Koperasi KORPRI di Sekretariat Daerah	2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		9.696.908,00
		Jumlah Investasi Permanen Lainnya	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00	-	9.696.908,00
	2001 & 2002	Dana Bergulir - Pinjaman Modal Ekonomi Kerakyatan	133.871.144.885,00		133.871.144.885,00		32.209.553,00

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ lembaga/Pihak Ketiga	Jumlah Penyertaan Modal Investasi Daerah	Penyertaan Modal Tahun 2023	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini (Per 30 Juni 2024)	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah Tahun ini (Per 31 Desember 2023)
1	2	3	6	7	9	10	11
	2002,2006,2007	PT. Bank Bukopin (Pola Swamitra)	22.235.014.226,89		22.235.014.226,89		-
		Jumlah Dana Bergulir	156.106.159.111,89	-	156.106.159.111,89	-	32.209.553,00
	2006	Koperasi 11 Unit (disebelas Kab/Kota) / Koperasi Unggulan	958.432.027,00		958.432.027,00		
	2007	Simpanan 24 Koperasi Simpan Pinjam	394.200.000,00		394.200.000,00		3.900.000,00
	2007	Pinjaman dalam rangka Penguatan Modal (DPM-LUEP)	141.631.818,00		141.631.818,00		
	2005 s.d 2007	Dana Usaha Desa (DUD)	63.500.000.000,00		63.500.000.000,00		
	2005 s.d 2007	Dana Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	9.413.220.000,00		9.413.220.000,00		
		Jumlah Investasi Non Permanen lainnya	74.407.483.845,00	-	74.407.483.845,00	-	3.900.000,00
Jumlah			1.259.360.579.602,89	1.629.756.311.496,47	2.318.164.396.070,07	-	948.696.491.992,65

Pekanbaru, 16 Oktober 2024
Pj. GUBERNUR RIAU,

Dr. RAHMAN HADI.,M.Si

PROVINSI RIAU
DAFTAR ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian	Jumlah Aset Tahun 2023 (31 Desember 2023)	Jumlah Aset Tahun 2024 (30 Juni 2024)
1	2	3	5
1	ASET LANCAR	713.844.329.191,95	990.602.802.868,52
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	2.659.762.009.119,51	2.088.809.514.090,22
3	ASET TETAP	30.320.520.785.306,50	30.280.321.678.943,90
	Tanah	13.898.002.327.572,40	13.865.702.879.052,40
	Peralatan dan Mesin	4.376.790.907.976,17	4.440.934.410.802,33
	Gedung dan Bangunan	7.720.367.720.475,54	7.727.259.217.765,53
	Jalan, Jaringan dan instalasi	16.742.225.004.034,90	16.743.479.094.953,90
	Aset Tetap Lainnya	2.978.126.600.452,22	3.086.865.562.131,22
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	838.491.553.494,38	1.056.449.900.707,39
	Akumulasi Penyusutan	(16.233.483.328.699,10)	(16.640.369.386.468,90)
4	ASET LAINNYA	514.996.629.267,07	281.834.683.178,92
	Tagihan Jangka Panjang	8.287.629.981,49	8.287.629.981,49
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	188.206.313.105,06	188.206.313.105
	Aset Tidak Berwujud	75.814.699.859,27	75.814.699.859
	Aset Lain-lain	335.450.040.139,35	335.172.824.309
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(56.212.403.219,24)	(56.935.978.899)
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(268.979.452.598,86)	(268.710.805.177)
	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	232.429.802.000,00	-
	Jumlah	34.209.123.752.885,00	33.641.568.679.081,50

Pekanbaru, 16 Oktober 2024
Pj. GUBERNUR RIAU,

Dr. RAHMAN HADI.,M.Si

PROVINSI RIAU
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI
DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran TA. 2022(Rp)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA. 2022 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp)	
				APBD TA. 2022	Perubahan APBD TA. 2022		APBD TA.2023	Perubahan APBD TA. 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	NIHIL							
	JUMLAH							

Pekanbaru, 16 Oktober 2024
Pj. GUBERNUR RIAU,

Dr. RAHMAN HADI.,M.Si

[illegible]

Pj. GUBERNUR RIAU,

Dr. RAHMAN HADI.,M.Si

LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 13 TAHUN 2024
TANGGAL : 16 OKTOBER 2024

PROVINSI RIAU
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

[illegible]

Pekanbaru, 16 Oktober 2024
Pj. GUBERNUR RIAU,

Dr. RAHMAN HADI.,M.Si